

LAPORAN PENELITIAN



**PERANAN BUPATI/WALIKOTA SEBAGAI PEJABAT PEMBINA
KEPEGAWAIAN DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN
PRINSIP NETRALITAS BIROKRASI
(STUDI KASUS DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA)**

Oleh :

1. Bagus Sarnawa, S.H.,MHum - NIP 260006276
2. Johan Erwin Isharyanto, S.H.,MH – NIK 153 020
3. Gina Hatmarista Wuri – NIM 20040610078
4. Sinta Fitra Dewi – NIM 20040610118

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

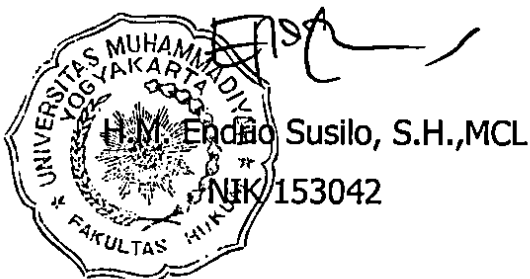
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMITRAAN

1. a. Judul Penelitian : PERANAN BUPATI/WALIKOTA SEBAGAI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN PRINSIP NETRALITAS BIROKRASI (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA)
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
- c. Kategori : Pengembangan Ilmu Pengetahuan
2. Ketua Peneliti
Nama Lengkap : Bagus Sarnawa, S.H.,MHum
Jenis Kelamin : Pria
Golongan Pangkat dan NIP : Penata – III/c dan 260006276
Jabatan Fungsional : Lektor
Jabatan Struktural : --
Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Administrasi Negara
Lama Penelitian : 6 bulan
Biaya yang diperlukan
Sumber dari UMY : Rp. 3.500.000,-

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Peneliti



Bagus Sarnawa, S.H., MHum
NIP 260006276

Mengesahkan
Kepala LP3M UMY

IR. H. Gatot Supangkat, MP

NIP 131 052 772

RINGKASAN

Menejemen PNS ini mengalami perubahan sangat signifikan khususnya semenjak terjadinya reformasi pada tahun 1998. Proses reformasi tersebut telah mengakibatkan perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan di negara ini. Salah satu perubahan tersebut adalah adanya desentralisasi kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusannya sendiri, termasuk kewenangan mengurus urusan yang berkaitan dengan kepegawaian. Sebagai akibat proses desentralisasi tersebut maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003, Bupati/Walikota merupakan pejabat pembina kepegawaian yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan kepegawaian khususnya dalam hal mengangkat, memindahkan serta memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya (Kabupaten/Kota). Disamping itu berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002, Bupati/Walikota juga berwenang untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2002, Bupati/Walikota berwenang menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Disisi lain berdasarkan sistem pemerintahan di Indonesia Bupati/Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat dari pengajuan partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa Bupati/Walikota terpilih merepresentasikan partai politik yang mengusulkannya dalam pemilihan Bupati/Walikota. Hal ini menimbulkan ambiguitas kedudukan dan peran Bupati/Walikota sebagai pejabat pembina kepegawaian yang harus netral tetapi pada sisi yang lain Bupati/Walikota adalah representasi dari partai politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi konflik akibat ambiguitas kedudukan walikota Yogyakarta sama sekali tidak nampak. Walikota dalam melaksanakan kepemimpinan di kota Yogyakarta khususnya dalam melaksanakan pembinaan PNS sangat memperhatikan aspek-aspek profesional, sehingga sistem karier dan sistem prestasi kerja menjadi tolok ukur dalam memberikan penghargaan kepada PNS dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam beberapa hal yang dapat dijadikan contoh adalah pengangkatan PNS dalam jabatan struktural tidak memperhatikan unsur senioritas atau unsur politik, namun lebih diperhatikan pada aspek kemampuan PNS yang bersangkutan. Penekanan aspek profesionalitas sebagaimana diamankan oleh UU Nomor 43 tahun 1999 yang berkaitan dengan menejemen PNS ternyata telah mendistorsi adanya potensi konflik dari ambiguitas kedudukan Walikota H. Hery Zuhdianto, S.E.,Akt, antara representasi partai politik dengan netralitas pejabat publik. Faktor latar belakang walikota sebagai seorang pengusaha justru lebih menonjol dalam gaya kepemimpinan Walikota Yogyakarta dibandingkan dengan pengaruh partai politik dimana Walikota aktif berkecimpung.

Hasil penelitian dengan melakukan wawancara terhadap PNS dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta juga menunjukkan bahwa PNS lebih menyorot gaya kepemimpinan Walikota dari aspek latar belakang pengusaha ini. Tidak ada satu pun PNS Pemerintah Kota Yogyakarta yang merasakan nuansa politis dalam gaya kepemimpinan Walikota Yogyakarta selama ini. Hal ini menimbulkan akibat positif berupa tidak adanya potensi konflik berkaitan dengan ambiguitas kedudukan walikota tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan PNS, sebagaimana pernah terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Kota Depok dan Kabupaten Temanggung.

Kata Kunci : Walikota, Pembinaan PNS

PRA KATA

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya maka laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Adapun laporan penelitian disusun dalam rangka untuk memenuhi kewajiban penulis dalam melaporkan hasil penelitian khususnya penelitian kemitraan dari Lembaga Penelitian, Pengembangan Pendidikan dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Laporan ini tentu masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, oleh sebab itu penulis sangat berharap kepada para pembaca yang budiman untuk sudi kiranya memberikan tegur sapa dan kritik yang membangun guna semakin menyempurnakan laporan penelitian ini.

Tidak lupa pada kesempatan ini pula penulis menhaturkan ucapan terima kasih yang setulusulusnya kepada para pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan penelitian ini. Ucapan terima kasih ini khususnya kami tujukan kepada :

1. Ibu Suslachah, S.H., Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta
2. Bapak Budiyanto, Kepala Bagian Umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta
3. Ibu Hayu Sukiyoprati, S.H., Kepala Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta
4. Bapak Ir Gatot Supangkat, MP, Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan Pendidikan dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
5. Ibu Nurwigati, S.H., MHum, yang telah membantu berdiskusi masalah birokrasi
6. Saudari Gina Hatmarista Wuri dan Saudari Sinta Fitra Dewi yang telah membantu penelitian kemitraan ini selama proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan laporan penelitian kemitraan ini.
7. Saudara Nur Rohman Alwi, staf pada Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Yogyakarta
8. Segenap pimpinan dan staf Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
9. Segenap pimpinan dan staf Dinas Perencanaan Pemerintah Kota Yogyakarta

10. segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Mudah-mudahan semua amal kebajikan bapak dan ibu mendapat pahala yang setimpal dari Dzat Yang Maha Memberi Allah SWT. Amin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Petumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEGAWAIAN	8
A. Sejarah Hukum Kepegawaian.....	8
B. Pengertian	12
C. Jenis	13
D. Dasar Hukum	14
E. Kedudukan	15
F. Hak dan Kewajiban	15
G. Menejemen PNS	33
H. Idealita Birokrasi	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23

Yogyakarta.....	47
B. Deskripsi PNS Pemerintah Kota Yogyakarta.....	65
C. Peran Walikota Yogyakarta dalam Pembinaan PNS	67
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR DAFTAR	--